

PERAN KOMUNITAS EPISTEMIK DALAM DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA MELALUI KERANGKA ASEAN POLITICAL- SECURITY COMMUNITY

THE ROLE OF EPISTEMIC COMMUNITY IN INDONESIA'S DEFENSE DIPLOMACY THROUGH ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY FRAMEWORK

Marika Moniek

Universitas Pertahanan

(marikaabdulgani@gmail.com)

Abstrak - Setelah berakhirnya Perang Dingin negara-negara di dunia memiliki perspektif baru dalam melihat ancaman keamanan. Didalam kawasan Asia Tenggara, ASEAN menjadi salah satu organisasi di kawasan yang berusaha untuk menjaga perdamaian dan stabilitas agar tercapai kesejahteraan bagi masyarakat, dengan melakukan upaya pembentukan Komunitas ASEAN yang memiliki tiga pilar, salah satunya adalah ASEAN Political-Security Community (APSC). Indonesia merupakan penggagas pertama pilar tersebut dan menjadikan Indonesia memiliki peran penting di kawasan. Dalam penelitian ini kemudian melihat bagaimana peran dari komunitas epistemik, yang merupakan think-tank atau kumpulan akademisi yang memberikan masukan dan saran bagi para stake holder untuk melakukan pengambilan kebijakan atau keputusan dalam pembentukan APSC dan bagaimana peran yang dilakukan untuk mencapai diplomasi pertahanan Indonesia melalui APSC tersebut. Tesis ini fokus pada peran komunitas epistemik sebagai instrumen diplomasi pertahanan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang terkumpul ialah melalui proses wawancara dengan 4 informan dari institusi terkait. Selain itu data yang digunakan juga dari berbagai literatur. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan Teori dan Konsep seperti Teori Peran Organisasi Internasional, Teori Security Community, Teori Multi-track Diplomacy, Konsep Diplomasi Pertahanan, dan Konsep Komunitas Epistemik. Penelitian ini menunjukkan dua hal yakni: Pertama, peran yang dilakukan komunitas epistemik dalam kerangka ASEAN Political-Security Community sebagai salah satu Komunitas di ASEAN; Kedua adalah diplomasi pertahanan di dalam ASEAN Political-Security Community yang dilakukan melalui track II diplomacy yaitu NADI sebagai komunitas epistemik pertahanan di ASEAN.

Kata Kunci: Komunitas Epistemik, Diplomasi Pertahanan, Komunitas Politik-Keamanan ASEAN

Abstract - After the Cold War had ended, states in the world have new perspective in viewing the security threats. In the South East Asia region, ASEAN becomes one of the regional organizations which attempts to preserve peace and the stability to achieve prosperity for the people, by establishing ASEAN Community which has three pillars, one of those is ASEAN Political-Security Community (APSC). Indonesia is the first initiator of that pillar and that makes Indonesia has an important role in the region. This research aims to see how the roles of Epistemic Community which

is think-tank or scholars community who give input and suggestion for the stakeholders to conduct policy making or decision in the establishment of APSC and how APSC's role to achieve Indonesia's Defense Diplomacy. This thesis focus on the Epistemic Community's role as an instrument of Defense Diplomacy. The researcher conducted qualitative research in this study. Data was obtained by interviewing four informants from associated institutions. Besides that, data was also obtained from some literatures. In this study, data was analyzed by Theory and Concept such as International Organization's Role Theory, Security Community Theory, Defense Diplomacy Concept, Multi-Track Diplomacy, and Epistemic Community Concept. The results of this study show that First, Epistemic Community's role in the ASEAN Political –Security Community Framework is one of community in ASEAN. Second, Defense diplomacy in ASEAN Political-Security Community is done through track II diplomacy that is NADI as Epistemic Community in ASEAN.

Keywords: Epistemic Community, Defense Diplomacy, ASEAN Political-Security Community

Pendahuluan

Pasca berakhirnya Perang Dingin, ditandai dengan runtuhnya tembok Belin pada tahun 1989, pemahaman keamanan dilihat oleh negara-negara di dunia tidak lagi sebatas permasalahan ideologi yang dimiliki oleh Blok Barat dan Blok Timur atau ancaman yang bersumber dari negara lain dan bersifat militer (*state security*), namun pemahaman keamanan telah meluas kepada permasalahan individu (*human security*). Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul “*People, State, and Fear*” menyatakan bahwa ada lima sektor dari ancaman yang dibagi atas aspek-aspek militer, politik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Kelima sektor ancaman yang dapat menyebabkan ketidakamanan nasional (*national insecurity*) dan hal-hal tersebut menjadi ancaman baru dalam stabilitas keamanan di dunia (Buzan, 1991). Hal tersebut

membuat negara-negara di dunia memiliki persepsi yang sama dalam melihat ancaman pasca Perang Dingin. Situasi yang terjadi membuat terbentuknya kerjasama yang membutuhkan diplomasi antar negara untuk mencapai tujuan dan kepentingan, baik kerjasama bilateral atau multilateral, secara regional atau global, khususnya dalam bidang keamanan dan pertahanan (Simatupang, 2013). Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan di dunia yang melihat adanya pergeseran keamanan tersebut. *Assosiation of Southeast Asian Nations* atau lebih dikenal dengan nama ASEAN merupakan salah satu organisasi di kawasan yang melihat bahwa kerjasama dalam menanggulangi pergeseran keamanan akan menjaga stabilitas hubungan antar negara di kawasan. ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967, di Bangkok, Thailand, melalui Deklarasi bersama yang dikenal dengan

Deklarasi Bangkok yang ditanda-tangani oleh lima negara penggagas pertama, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand (ASEAN, ASEAN Selayang Pandang, 2012, hal. 2). ASEAN merupakan suatu organisasi kawasan di Asia Tenggara yang memiliki tujuan memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan dan meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas (ASEAN, Piagam ASEAN, 2010). Pada tahun 2003, ASEAN mengesahkan *Bali Concord II* pada KTT ASEAN Ke-9 di Bali dan menyepakati pembentukan Komunitas ASEAN. Dalam pertemuan selanjutnya, yaitu pada 15 Desember 2008, pasca seluruh negara ASEAN menyampaikan ratifikasi terhadap perubahan mendasar dalam mekanisme ASEAN, dari organisasi yang longgar (*loose association*) menjadi organisasi yang berdasarkan hukum (*rules-based organization*) dan menjadi subjek hukum (*legal personality*), yang kesemuanya tertulis didalam Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*), di dalamnya kemudian tercantum ketetapan ASEAN untuk membentuk Komunitas ASEAN pada

tahun 2015. Komunitas ASEAN ini terdiri dari 3 pilar, yaitu Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*), dan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community*) (ASEAN, ASEAN Selayang Pandang, 2010, hal. 20-21).

Kerjasama ASEAN kini menuju tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan ke depan dengan dibentuknya Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Hal ini semakin diperkuat dengan disahkannya Piagam ASEAN yang secara khusus akan menjadi landasan hukum dan landasan jati diri ASEAN ke depannya. Komunitas ASEAN ini mencita-citakan untuk ASEAN menjadi suatu satuan komunitas yang berpandangan maju ke depan, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, serta disatukan oleh hubungan kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan masyarakat yang perduli. Komunitas ASEAN 2015 ini terjadi setelah adanya penandatanganan “*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*” pada Januari 2007, di Cebu, Filipina (Pratama, Tantangan dan Peluang Indonesia dalam Pembentukan ASEAN Community 2015 di

Bidang Keamanan, 2014). *Bali Concord II* merupakan pencapaian penting dalam proses menuju integrasi ASEAN, dengan dibentuknya Komunitas ASEAN yang ditargetkan berlaku pada tahun 2015. Melalui sebuah komunitas, ASEAN berjuang untuk mengubah statusnya untuk menuju satu kesatuan masyarakat yang terdiri atas bangsa-bangsa, *transforming it self from an association of states into a real community of nations*. Dengan kata lain, ASEAN memulai proses transformasi dari kumpulan negara yang berasosiasi ke arah komunitas kawasan yang lebih terintegrasi (Fauzi, 2008). Indonesia merupakan negara yang memiliki peran penting di kawasan Asia Tenggara dan menjadi negara penggagas pembentukan ASEAN *Political-Security Community* serta memainkan peran penting dalam perumusan dua pilar lainnya. Gagasan tentang hal tersebut kemudian dipercayakan kepada Indonesia untuk selanjutnya dirumuskan langkah-langkah perwujudannya. Tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh ASEAN mendorong para pemimpin yang ada untuk menjadikan ASEAN sebagai suatu organisasi yang dinamis, solid dan mampu menyelesaikan sendiri masalah-masalah regional yang timbul di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sendiri

kemudian, menempatkan ASEAN sebagai prioritas utama dalam penentuan kebijakan politik luar negeri yang merefleksikan keinginan Indonesia untuk memainkan peran aktif dan kepemimpinannya di kawasan regional Asia Tenggara sehingga dapat tercipta kawasan yang stabil, aman, damai, dan kondusif, serta terjalinnya hubungan yang harmonis diantara negara-negara ASEAN.

ASEAN *Political-Security Community* (APSC) adalah suatu komunitas masyarakat yang secara khusus mengandalkan proses damai dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi di antara sesama anggota. Komunitas ini berpegang pada prinsip-prinsip non-interferensi, pengambilan keputusan berdasarkan mufakat, ketahanan nasional dan regional, saling menghormati kedaulatan nasional, penghindaran penggunaan ancaman ataupun penggunaan kekuatan dan penyelesaian perbedaan maupun perselisihan secara damai. Sasaran kerjasama keamanan diarahkan pada upaya-upaya menangkal persengketaan diantara sesama negara anggota maupun antara negara anggota dengan Negara-negara non-ASEAN, untuk mencegah eskalasi persengketaan itu menjadi konflik (Haqqi, 2016). Selaku penggagas

APSC, Indonesia mempelopori penyusunan Cetak Biru komunitas tersebut yang terdiri dari tiga karakteristik, yaitu (1) *a ruled based community with shared values and norms*, (2) *a cohesive, peaceful and resilient region with shared responsibility for comprehensive security*, (3) *a dynamic and outward looking region* (ASEAN, ASEAN Selayang Pandang, 2012, hal. 13). Keberadaan APSC ini dikatakan sebagai strategi dasar dalam mencapai Kepentingan Nasional Indonesia dalam aspek pertahanan dan keamanan. Seperti yang dikemukakan Rodon Pedrason dalam tulisannya yang berjudul “**Dua Sisi Koin Diplomasi Pertahanan**”, bahwa hampir satu dasawarsa terakhir, kerjasama yang lebih erat antara militer ASEAN atas berbagai isu yang mencakup tugas dan fungsi utama, serta peran militer di luar tugas tradisional militer itu sendiri, seperti tugas-tugas penjaga perdamaian, memajukan tata pemerintahan yang baik, respons cepat terhadap bencana alam dan kemanusiaan, serta melindungi hak asasi manusia yang saat ini lebih dipopulerkan sebagai suatu Diplomasi Pertahanan (Pedrason, Dua Sisi Koin Diplomasi Pertahanan, 2015). Tidak dapat dipungkiri, Indonesia saat ini sedang melakukan

suatu langkah Diplomasi Pertahanan di kawasan Asia Tenggara, khususnya di dalam ASEAN. Peran Indonesia dalam APSC menjadi suatu langkah dalam rangka melakukan suatu diplomasi pertahanan di kawasan.

Diplomasi Pertahanan itu sendiri merupakan aktivitas kerjasama yang dilakukan militer dan infrastruktur terkait pada masa damai. Diplomasi pertahanan melibatkan kerjasama militer dalam isu yang lebih luas, melalui peran militer sampai peran non-tradisional, seperti penjaga keamanan (*peacekeeping*), penegak keamanan (*peace enforcement*), mempromosikan *good-governance*, tanggap bencana, dan melindungi hak asasi manusia. Berbeda dengan masa lalu, dimana militer hanya bekerjasama dengan sekutunya, saat ini kerjasama militer juga dilakukan antar negara bahkan negara yang sedang bersaing dalam dunia internasional untuk mencapai kepentingan negaranya (Tan, From 'Boots' to 'Brogues': The Rise of Defence Diplomacy in South East Asia, 2011). Menurut Rodon Pedrason dalam disertasinya menyebutkan bahwa diplomasi pertahanan merupakan segala bentuk metode dan strategi yang digunakan oleh negara-negara yang bersaing satu sama lain, tetapi negara-

negara tersebut melakukan segala bentuk praktek yang berhubungan dengan ekonomi, budaya, kerjasama politik dan pertahanan serta diplomasi untuk dapat memiliki hubungan baik dengan harapan untuk kemudian dapat bekerjasama satu dengan yang lain dan meningkatkan rasa saling percaya diantara negara-negara tersebut (Pedrason, *ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community?*, 2015). Sesuai dengan Buku Putih Pertahanan Indonesia, bahwa dibandingkan mengejar peningkatan kekuatan militer, Indonesia memilih untuk lebih bergantung kepada kekuatan diplomasi sebagai kekuatan pertama dalam pertahanannya dan dengan pengertian tersebut Indonesia telah membangun hubungan dan jaringan yang luas dalam bidang pertahanan dengan banyak mitra dilingkungan strategisnya (Gindarsah, 2015). Perkembangan kerjasama ASEAN telah tumbuh semakin pesat. ASEAN juga menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dan akademisi secara aktif bagi relevansi ASEAN dimasa depan. Pada tahun 1980an, ide tentang keterlibatan masyarakat dalam mekanisme *decision making process* di ASEAN, telah dikemukakan oleh Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia yang menjadi

penggagas terbentuknya ASEAN. Adam Malik mengatakan bahwa "*the shaping of a future of peace, friendship and cooperation is far too important to be left to government and government officials... (as such, there is a need for) ever-expanding involvement and participation of the people*" (Chandra, 2009, hal. 72).

Kemudian pada tahun 1988, berdiri *ASEAN Institutes for Strategic and International Studies* (ASEAN-ISIS) yang memberikan ide untuk memiliki suatu perkumpulan bagi masyarakat di ASEAN. Setelah itu pada tahun 2000 terselenggara pertemuan masyarakat ASEAN atau *ASEAN People's Assembly*. Sejak saat itu, partisipasi dari masyarakat diakui oleh ASEAN dan para anggotanya. Tujuan dari ASEAN-ISIS ini adalah untuk mewadahi semua *think tank*, sebutan bagi para pemikir yang kemudian tergabung dalam suatu kelompok yang disebut sebagai komunitas epistemik, di negara-negara ASEAN agar masyarakat yang tergabung dalam sebuah organisasi atau komunitas tersebut dapat membagi pandangan mereka dalam proses mekanisme ASEAN dan langkah-langkah ini merupakan perubahan signifikan dari ASEAN, yang secara tradisional hampir selalu berpusat secara eksklusif kepada elit politisi dan birokrat (Chandra, 2009,

hal. 73). Indonesia saat ini merupakan negara yang menganut paham demokrasi dan sebagai salah satu anggota di ASEAN, Indonesia menjadikan masyarakat dapat berpendapat dan mengutarakan pemikirannya, salah satunya melalui komunitas epistemik (*epistemic community*), yaitu kumpulan sekelompok orang atau *working group* akademisi yang memiliki kompetensi teknis dibidang terkait dan berupaya untuk saling berbagi ilmu pengetahuan serta mampu menyediakan beragam kerangka rujukan (*frame of reference*) yang dapat digunakan bagi perumusan komponen-komponen normatif (*rule formation*) dari formulasi kebijakan (Arif, 2015).

Menurut Obsatar Sinaga, dalam jurnal yang berjudul “***Epistemic Community and The Role of Second-Track Diplomacy in East Asia Economic Cooperation***,” mengatakan bahwa peran komunitas epistemik merupakan konsep yang merujuk kepada jalur kedua atau *second-track diplomacy*, yang merupakan aktivitas tidak resmi, termasuk didalamnya para akademisi, *think tank* atau para pemikir, para peneliti, dan hubungan dari pemerintah dengan para pejabat yang berwenang dalam diplomasi tersebut. Peran komunitas epistemik ini sama pentingnya dengan *first-track*

diplomacy, dimana diplomasi yang dilakukan merupakan diplomasi yang merupakan langsung dari pemerintahan suatu negara dengan melibatkan organisasi internasional dalam prosesnya, dan kedua hal tersebut memiliki persamaan dalam bentuk partisipasi yang diberikan sebagai representatif bagi pemerintah dalam aktifitas diplomasi yang dilakukan (Sinaga, 2013). Konsep tentang komunitas epistemik juga dikemukakan oleh Peter M. Haas, yang menyebutkan bahwa meskipun komunitas epistemik dapat terdiri dari profesional berdasarkan berbagai disiplin ilmu dan latar belakang, mereka memiliki (1) satu set bersama keyakinan normatif dan berprinsip, yang memberikan alasan berdasarkan nilai-untuk aksi sosial anggota masyarakat; (2) berbagi keyakinan kausal, yang berasal dari analisis mereka tentang perilaku yang mengarah atau memberikan kontribusi untuk satu permasalahan dalam domain mereka dan yang kemudian menjadi dasar untuk menjelaskan dengan beberapa hubungan antara tindakan kebijakan dan hasil yang diinginkan; (3) pengertian validitas bersama yaitu, intersubjektif, kriteria internal yang ditetapkan untuk menimbang dan memvalidasi pengetahuan dalam domain keahlian

mereka; dan (4) praktek umum dalam kebijakan yang terkait dengan serangkaian masalah yang kompetensi profesional mereka yang diarahkan dari keyakinan bahwa kesejahteraan manusia akan ditingkatkan berdasarkan kebijakan tersebut (Haas P. M., Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination, 1992).

Indonesia sebagai negara berkembang saat ini, menjadi negara terbesar di ASEAN kemudian memiliki suatu kepentingan dalam menghadapi pergeseran persepsi keamanan di Asia Tenggara dan diberikan wewenang untuk kemudian mewujudkan APSC sebagai salah satu pilar dari Komunitas ASEAN. Keterlibatan masyarakat dalam suatu organisasi atau komunitas epistemik yang telah dirasa perlu untuk pengembangan ASEAN yang lebih baik kedepannya, menjadi salah satu tools untuk pembuatan kebijakan oleh negara-negara ASEAN. Menurut asumsi penulis, keterlibatan masyarakat dalam suatu komunitas epistemik menjadi penting karena dapat membawa aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat. Sesuai dengan pemikiran yang dimiliki oleh Adam Malik, bahwa pembentukan masa depan yang damai, persahabatan dan kerjasama tidak hanya diserahkan kepada para pejabat

pemerintah dan pemerintah, namun adanya partisipasi dari masyarakat akan membantu untuk mewujudkan ASEAN yang lebih baik. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk terus berkembang dengan melibatkan partisipasi masyarakat didalam pembentukan kebijakan ASEAN. Analisis lebih lanjut mengenai implementasi diplomasi pertahanan melalui komunitas epistemik perlu dilakukan. Keterlibatan komunitas epistemik dalam mewujudkan diplomasi pertahanan Indonesia saat ini menjadi hal penting karena sesuai dengan yang tertulis dalam Piagam ASEAN, bahwa memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang di dalamnya seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari, proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN, menjadi dasar untuk kemudian peneliti melihat bagaimana keterlibatan komunitas epistemik yang merupakan gabungan dari masyarakat ataupun para akademisi melakukan perannya dalam APSC tersebut. Sehingga berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis diplomasi pertahanan Indonesia melalui ASEAN *Political-Security Community* melalui komunitas epistemik yang akan

dituangkan kedalam penelitian yang berjudul **Peran Komunitas Epistemik dalam Diplomasi Pertahanan Indonesia Melalui Kerangka ASEAN Political-Security Community**” dalam penelitian jurnal ini.

Metodologi

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif. Dengan menerapkan desain penelitian kualitatif dalam penelitian ini, peneliti mampu untuk mengeksplorasi fenomena yang diteliti dengan menggunakan berbagai macam sumber data, baik itu data primer maupun data sekunder. Bodgan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2002). Oleh karena itu, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif karena peneliti mampu untuk mendeskripsikan bagaimana peran komunitas epistemik dalam melakukan diplomasi pertahanan Indonesia melalui kerangka *ASEAN Political-Security Community*. Dalam penelitian ini, data primer yang dianalisis oleh peneliti adalah data yang diperoleh melalui hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti

Centre for Strategic and International Studies sebagai komunitas epistemik yang memiliki peran besar dalam terbentuknya *ASEAN Political-Security Community* (APSC), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan sebagai *track I* dalam melakukan diplomasi pertahanan di APSC yang melakukan kerjasama dengan komunitas epistemik yang ada di Indonesia. Untuk data sekunder dalam penelitian ini, peneliti membaca dan juga mencatat informasi baik itu dari buku, jurnal, artikel, maupun dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan tiga langkah analisis data seperti yang dikemukakan oleh John W. Creswell (1994), yaitu (1) reduksi data, data yang diperoleh melalui wawancara dan juga studi kepustakaan direduksi oleh peneliti untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data-data tersebut, (2) penyajian data, data yang sudah direduksi dan dipilih oleh peneliti selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis, serta diberikan tabel maupun grafik yang dapat memberikan informasi mendetail mengenai penelitian ini, dan (3) penarikan kesimpulan, setelah data penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif analisis, selanjutnya peneliti

menarik kesimpulan berdasarkan sajian data tersebut. Peneliti menarik kesimpulan yang bersifat interpretasi/tafsiran yang merupakan hasil wawancara dan juga studi kepustakaan.

Hasil Pembahasan

ASEAN *Political-Security Community* (APSC) merupakan bentuk integrasi kawasan yang tidak ditujukan untuk membangun sebuah pakta pertahanan. Komunitas ini bersifat terbuka serta menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, APSC menganut kerjasama keamanan secara menyeluruh (*comprehensive security*) yang mengakui keterkaitan politik, ekonomi, sosial budaya, didalam pembangunan lingkungan yang damai. APSC pun menekankan kepada prinsip penyelesaian sengketa secara damai dan menolak segala bentuk agresi atau penggunaan kekuatan militer, prinsip non-intervensi dan konsensus, serta menerapkan kerjasama keamanan di berbagai tingkatan secara multilateral dalam kerangka ASEAN dan mitra wacana ASEAN. Dengan kata lain, APSC memiliki norma yang sama dengan konsep ASEAN yang mengedepankan dialog serta kebersamaan antar anggota, dan APSC merupakan pilar komunitas ASEAN yang

digagas untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan.

Indonesia menjadi *Chairman ASEAN Standing Comitee* atau Ketua Panitia Tetap ASEAN yang ke-37 di bulan Juni tahun 2003. Dalam mekanisme kerjasama ASEAN ini, panitia tetap merupakan mekanisme koordinasi umum dari seluruh kegiatan ASEAN dan bertanggung jawab kepada Sidang Tahunan Menteri Luar Negeri ASEAN atau *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM). Pada tahun tersebut, Indonesia menjadi tuan rumah dan saat itu Departemen Luar Negeri Indonesia mengemukakan inisiatif untuk membuat suatu gagasan untuk membentuk pilar politik dan keamanan di KTT ASEAN Ke-9. Gagasan ini sebenarnya sudah terbentuk sejak akhir tahun 2002 pada pertemuan informal Menteri Luar Negeri RI dengan mengundang Rizal Sukma, seorang peneliti dari komunitas epistemik *Centre of Strategic and International Studies* (CSIS) di Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 2003, Rizal Sukma membawakan sebuah paper yang berisi :

1. Didalam *Principle of Non-Interference*, prinsip utama ASEAN yang harus tetap dilaksanakan tetapi lebih secara fleksibel, yaitu dengan lebih terbuka dan kooperatif dengan negara anggota lainnya dalam membahas masalah internal yang

berdampak kepada regional, seperti kasus Hak Asasi Manusia. Kemudian anggota-anggota ASEAN lebih diharapkan terbuka terhadap saran-saran dari negara anggota lain dengan catatan telah diregulasi dan disampaikan dengan pantas serta tidak diperlukan menjadi reaktif terhadap suara-suara *civil society* negara anggota lain.

2. *Respect of National Sovereignty*, dimana prinsip ini perlu tetap menjadi prinsip tertinggi yang mengatur soal hubungan antar-negara dengan diijinkannya negara-negara anggota mengembangkan mekanisme melalui ASEAN sehingga sebagai institusi dapat menolong isu internal yang implikasinya jelas terhadap kawasan. ASEAN juga perlu meningkatkan kemampuan kerjasama untuk mencegah konflik menjadi suatu konflik kekerasan. Selain itu, ASEAN juga perlu mengembangkan kapasitas untuk dapat melaksanakan peran *peacekeeping* dalam konflik internal, dengan catatan peran itu didasarkan atas persetujuan negara yang bersangkutan.

3. Prinsip pengambilan keputusan berdasarkan dengan konsensus. Prinsip ini hanya berlaku dan perlu digunakan seperti dalam penerimaan anggota, namun selebihnya perlu dirujuk secara

selektif atau digunakan “*flexibility decision making*.”

4. Penekanan prinsip *comprehensive security*. Rizal Sukma melihat bahwa saat itu ASEAN masih menekankan “*state security*” dibandingkan dengan “*human security*”. Sebuah komunitas keamanan harus dapat menyeimbangkan perhatian kepada “*state security*” dengan lebih menekan terhadap “*human security*” dan memberi lebih banyak ruang bagi interaksi *people to people*, karena ASEAN dengan paradigma *State Centric* akan membuat institusi tersebut tidak akan dapat meraih kembali relevansinya.

Paper tersebut dipresentasikan oleh Rizal Sukma dalam seminar *ASEAN Cooperation: Challenges and Prospects in the Current International Situation* di New York, Amerika Serikat pada 3 Juni 2003. Gagasan APSC pertama kali dikemukakan oleh Rizal Sukma kepada Departemen Luar negeri Indonesia. Setelah melalui proses pengolahan, gagasan ini kemudian diajukan Indonesia secara resmi pada AMM ke-36 di Phnom Penh, Kamboja, di Pertengahan Juni 2003 (Luhulima, 2010). Agenda pembangunan politik yang merangkum di dalamnya agenda demokratisasi ASEAN akhirnya berhasil masuk ke dalam dokumen resmi ASEAN. Kata “demokrasi” bahkan disebutkan

dengan jelas di dalam *ASEAN Political-Security Community Blueprint*. Konsep yang ditanamkan dalam APSC merefleksikan mulai berkembangnya perhatian pemimpin ASEAN pada demokrasi dan Hak Asasi Manusia demi menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Tujuan utama dari pendirian APSC adalah "Komunitas berbasis aturan dan nilai norma bersama" dengan jalan "Mempromosikan pembangunan politik berasaskan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental." (ASEAN Secretariat, 2009). Dalam konteks tersebut negara-negara anggota ASEAN tidak boleh membiarkan pergantian pemerintahan yang tidak konstitusional dan tidak demokratis atau penggunaan wilayah mereka untuk tindakan apapun yang dapat membahayakan perdamaian, keamanan dan stabilitas negara-negara ASEAN lainnya.

Dalam *Joint Communique AMM ke-36* tahun 2003, disebutkan untuk mencapai integrasi di ASEAN, anggota-anggota mengakui hal yang sama pentingnya antar kerjasama di bidang politik dan keamanan dalam mencapai hal tersebut. Anggota-anggota ASEAN menyepakati

untuk meneruskan dan mempertimbangkan komponen integrasi yang akan menjamin perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan. Pada saat KTT ASEAN ke-9 di Bali, sebuah *Plan of Action* diperlukan untuk mewujudkan komunitas tersebut dan Indonesia dipercaya untuk memimpin perumusan *ASEAN Security Community Plan of Action (ASC PoA)*. Pada KTT ASEAN ke-10 di Laos tahun 2004, ASC PoA disahkan oleh para menteri luar negeri ASEAN dalam "*Vientiane Action Program*" (VAP). Konsep komunitas keamanan ini, menurut ASC PoA, dibentuk untuk memastikan semua negara yang berada di dalam kawasan hidup tentram dan damai di dalam lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Sejalan dengan hal tersebut, keberadaan APSC menjadi salah satu wadah dalam melakukan diplomasi pertahanan Indonesia. Indonesia memberikan gagasan dan dipercaya untuk membuat *blue-print* APSC, menjadi langkah awal yang baik untuk memainkan perannya di ASEAN.

Dalam cetak biru tersebut APSC memiliki tiga karakteristik, yaitu Komunitas Berbasis Aturan dengan Nilai dan Norma Bersama (*A Rules-based Community of Shared Values and Norms*),

Sebuah Wilayah Terpadu, Damai dan Tangguh dengan Tanggung Jawab Bersama untuk Keamanan Menyeluruh (*A Cohesive, Peaceful, Stable and Resilient Region with Shared Responsibility for Comprehensive Security*), dan Kawasan yang Dinamis dan Berpandangan Keluar dalam Dunia yang Semakin Terintegrasi dan Saling Bergantung (*A Dynamic and Outward Looking Region in an Increasingly Integrated and Interdependent World*). Dalam penyusunan APSC, Indonesia memainkan peranan penting. Usul-usul Indonesia yang diterima dalam APSC, antara lain, mendorong pengamatan pemilihan umum sukarela (*voluntary electoral observations*), membentuk Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, memasukkan elemen memerangi korupsi dan pemajuan prinsip demokrasi, menggagas pembentukan *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation*, menggagas pembentukan *ASEAN Maritime Forum* (AMF), membentuk Kerja sama penanganan *illegal fishing*, dan menyusun instrumen ASEAN tentang Hak Pekerja Migran (Kementerian Luar Negeri RI, 2013).

Peran komunitas epistemik, terutama CSIS pada saat itu, dalam kerangka APSC yang diterima dengan

positif oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, menjadi batu loncatan Indonesia untuk mengembalikan citra dan kekuatannya di ASEAN sebagai negara yang paling besar, jangkar stabilitas di kawasan Asia Tenggara, dan pengenalan demokrasi di ASEAN menjadi meluas, mengingat tidak semua negara di ASEAN menganut paham demokrasi. Agenda demokratisasi ASEAN adalah inisiatif Indonesia. Indonesia ingin memainkan peran kembali dalam kancah regional ASEAN. Beberapa cendekiawan Indonesia seperti Rizal Sukma, mulai memberikan wacana demokratisasi sebagai agenda ASEAN. Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan cepat mengambil gagasan ini dan menempatkannya di dalam agenda diplomasi Indonesia. Tantangan terhadap agenda demokratisasi dilukiskan oleh Rizal Sukma, meskipun secara formal mengakui pentingnya demokrasi sebagai landasan bagi keamanan, banyak negara anggota yang gagal untuk melihat bagaimana ASEAN dapat mendamaikan prinsip tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing sebagai basis hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Rizal menyakini bahwa demokrasi adalah landasan yang penting bagi keamanan dan perdamaian. Peran diplomasi

Indonesia untuk memasukkan agenda demokratisasi ASEAN, mendapat tantangan dari beberapa negara anggota yang lain, di samping juga dari dalam negeri Indonesia. Negara-negara ASEAN terbelah, Indonesia, Kamboja, Filipina dan Thailand setuju untuk menyebut istilah demokrasi, sementara Brunai, Laos, Myanmar dan Vietnam menyatakan keberatannya tentang penyebutan demokrasi sebagai sebuah tujuan bersama ASEAN. Indonesia meskipun sebagai penggagas demokratisasi ASEAN, namun Indonesia membutuhkan waktu yang lama untuk meratifikasi Piagam ASEAN. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) akhirnya meloloskan ratifikasi terhadap Piagam ASEAN tersebut pada bulan Oktober 2008. Ratifikasi terhadap Piagam ASEAN ini dilengkapi dengan addendum secara terbuka menekankan pentingnya kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Rizal Sukma juga mengatakan, Indonesia ingin terus menggalakkan pembangunan demokrasi di ASEAN dengan keyakinan bahwa keamanan regional akan lebih terjamin jika negara-negara anggota mematuhi prinsip-prinsip demokrasi itu.

APSC kemudian menjadi komunitas keamanan yang mengedepankan perdamaian dan

stabilitas pada masa damai di kawasan. Kerja sama dalam kerangka APSC, sebagaimana termuat dalam cetak birunya, dielaborasi lebih spesifik dalam kerja sama bidang politik, keamanan, dan hukum yang mencakup spektrum yang luas dari permasalahan tradisional dan nontradisional, dari upaya untuk memajukan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), menangani masalah terorisme, menanggulangi bencana alam, dan memberantas korupsi. Kerja sama Bidang Politik, yaitu memajukan pemerintahan yang baik, memajukan prinsip-prinsip demokrasi, memajukan kedamaian dan stabilitas kawasan, menjamin implementasi SEANWFZ dan Rencana Aksinya, memajukan kerja sama maritim ASEAN, mewujudkan resolusi konflik dan penyelesaian sengketa secara damai, memperkuat sentralitas ASEAN, dan memajukan hubungan dengan pihak eksternal. Kerja sama Bidang Keamanan mencakup, pencegahan konflik/upaya-upaya membangun kepercayaan (*Confidence Building Measures/CBM*), penguatan proses ARF, penanganan isu keamanan non-tradisional (bajak laut, perompakan terhadap kapal, pembajakan dan penyelundupan, dll), penguatan kerja sama ASEAN dalam penanganan bencana

dan tanggap darurat, pemajuan transparansi dan pemahaman mengenai kebijakan pertahanan dan persepsi keamanan. Kerja sama Bidang Hukum juga dilakukan di dalam APSC, untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemajuan dan Perlindungan HAM, pengembangan pengaturan hukum untuk memerangi narkoba, pembentukan kerja sama penanganan kejahatan lintas batas, peratifikasian *atas Konvensi ASEAN tentang Kontra-Terrorisme (ASEAN Convention on Counter Terrorism)*, Pembentukan kerja sama dalam isu ekstradisi, dan Peratifikasian Traktat tentang Bantuan Hukum Terkait Masalah-masalah Kriminalitas (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLAT*) (Kementerian Luar Negeri RI, 2013). Dengan adanya kerjasama-kerjasama yang dilakukan dalam APSC dan norma-norma yang dianut dengan kesepakatan bersama melalui dialog yang dilakukan oleh negara-negara di ASEAN, menjadi bukti upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik di kawasan dan membangun CBM antar negara yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di ASEAN.

Komunitas epistemik sebagai suatu jaringan yang memiliki kompetensi khusus pada bidang-bidang tertentu akan

saling berusaha untuk meningkatkan kerjasama internasional antar negara dan dalam mencapai kepentingan nasional negara. Karena pada dasarnya negara tidak akan bisa *survive* jika tidak memiliki kepentingan nasional. Komunitas epistemik berperan membantu negara untuk mengambil suatu keputusan dan kebijakan negara. Setiap peranan komunitas epistemik tersebut kemudian akan dievaluasi seberapa besar memberikan pengaruh dan mampu berperan signifikan dalam membantu mewujudkan kepentingan negara. Peran komunitas epistemic adalah harus mampu menjawab seluruh tantangan mengenai hal-hal yang dirasa semakin kompleks keberadaannya (Haas P. M., 1989). Dalam konteks regional, kawasan Asia Tenggara adalah wilayah negara-negara yang cenderung diperhadapkan dengan permasalahan batas wilayah yang masih belum dapat diselesaikan serta berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik, terutama di negara-negara berkembang, menjadi suatu ancaman non-tradisional yang akan tetap menjadi ancaman nyata karena melihat negara-negara berkembang banyak memiliki sistem pengamanan dan pengawasan yang cenderung masih lemah akibat rendahnya tingkat penguasaan teknologi

dan sarana alat berteknologi tinggi, akibatnya tidak dapat mengontrol stabilitas negara dan menimbulkan kejahatan-kejahatan internasional (Kemhan, 2011). Dengan adanya ancaman keamanan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan maka diperlukan diplomasi pertahanan negara yang memadai. Hal ini tidak lepas dengan peranan komunitas epistemik dalam setiap diplomasi pertahanan negara.

Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang sudah secara konsisten menerapkan diplomasi pertahanan dan menempatkannya sebagai alat utama dalam struktur diplomasi kerjasama internasional. Diplomasi pertahanan dilakukan dengan berdasar pada beberapa prinsip yakni pertama, bahwa harus dijalankan dalam koridor yang berada diantara kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri pemerintah. Kedua, bahwa penyelenggaraan diplomasi pertahanan perlu menerapkan politik luar negeri yang pada hakekatnya berperan sebagai alat perdamaian. Peran komunitas epistemik dalam diplomasi pertahanan Indonesia sangat dibutuhkan sebagai bentuk rangkaian dengan sistem negara untuk mewujudkan setiap kepentingan nasional negara, terutama dalam menjaga

stabilitas negara dan kawasan. Selain CSIS yang berperan penting, *think-tank* lainnya yang juga terlibat adalah NADI (*Network of ASEAN Defense Security Institutions*) dimana pertama dilakukan pertemuan perdana pada tahun 2007 di Singapura dengan menghadirkan perwakilan *think-tank* dari pertahanan dan keamanan ASEAN serta lembaga kementerian pertahanan. Mereka membahas dan bertukar pandangan mengenai beberapa agenda yakni;

- a) *outlook* keamanan regional
- b) prospek untuk keamanan dan pertahanan kerjasama ASEAN dan rekomendasi untuk kerja samanya
- c) rekomendasi untuk mendirikan *Track II* Jaringan pertahanan dan keamanan lembaga ASEAN.

NADI sendiri akan menjadi forum yang relevan dan berguna dalam proses yang sedang berlangsung penciptaan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN. Seiring dengan berjalannya waktu pertemuan NADI dilakukan secara intens setiap tahunnya. NADI juga aktif melakukan *workshop* yang berkaitan dengan peningkatan strategi pertahanan-keamanan kawasan ASEAN. Pada tahun 2013 NADI mengadakan *Workshop on Strengthening Strategic Security Cooperation in ASEAN* yang difasilitasi oleh

National Defence Studies Institute (NDSI) of the Royal Thai Armed Forces di Bangkok. Dari *workshop* tersebut disimpulkan bahwa strategi visi APSC akan menjadi: "sebuah komunitas yang harmonis dan aman, hidup bersama dalam damai sesuai dengan Piagam ASEAN dan prinsip-prinsip serta norma-norma Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama". Lokakarya ini juga membahas dan menyepakati tujuan bahwa masa depan kerjasama ASEAN di bidang keamanan non-tradisional seperti bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, operasi penjaga perdamaian, kedokteran militer, keamanan maritim dan kontra-terorisme harus dicapai. Tahun 2014, NADI mengadakan *workshop* di Manila mengenai *Regional Maritime Rules of Engagement* yang terdiri dari beberapa agenda yakni;

- a) pertukaran pandangan mengenai mekanisme regional dan pengaturan kelembagaan untuk interaksi maritim dan keterlibatan di laut Asia Tenggara
- b) eksplorasi skenario ketidakpastian dan ketegangan
- c) unsur / prinsip aturan keamanan masa depan maritim regional
- d) cara ke depan *Track II* untuk menyarankan ke ADMM sebagai *Track I* tentang cara mengambil proses menuju

implementasinya di masa depan. Lokakarya ini telah memiliki pertukaran yang luas dan aktif dari pandangan di antara delegasi anggota NADI dan mereka menyimpulkan dengan saran untuk memindahkan proses ke depan yang lebih baik.

Dalam *workshop* NADI tahun 2015 mengenai *New Trends in Terrorism: Challenges and Responses* menghadirkan para delegasi negara ASEAN kecuali Vietnam dan Myanmar dimana memberikan presentasi tentang perspektif tingkat nasional mereka dari tantangan terorisme. Para delegasi memiliki pertukaran pandangan aktif dalam menyepakati rekomendasi yang akan dibuat untuk *The ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM)*. Hal tersebut dilakukan mengingat munculnya kelompok teroris baru termasuk ISIS dan meningkatkan kegiatan memerangi terorisme di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Dalam menanggapi ancaman terorisme, pemerintah harus mengambil pendekatan terhadap seluruh bangsa dan membangun kesiapan serta kapasitas mereka. Semua lembaga keamanan yang relevan termasuk militer akan memiliki peran penting untuk terlibat. Di tahun yang sama NADI juga mengadakan *workshop* lain mengenai "*Peace, Conflict*

Management and Conflict Resolution” dimana difokuskan pada pandangan dan pengalaman manajemen dan resolusi konflik di antara negara anggota ASEAN, dengan harapan bahwa pengalaman tersebut dapat dimaksud dalam menghadapi masa krisis. Para delegasi mempresentasikan rekomendasi untuk meningkatkan kerjasama dalam manajemen konflik dan resolusinya yang akan dibuat untuk ADMM sebagai pertimbangan mereka. Selain itu juga dibahas “*Prosperity and Security through Defense Diplomacy*” dimana para anggota negara ASEAN sepakat bahwa diplomasi pertahanan penting untuk menjaga sentralitas ASEAN dan solidaritas, yang pada gilirannya penting untuk membina suasana yang baik dan stabil untuk menjaga perdamaian regional dan pembangunan ekonomi. Agenda pertemuan NADI ke-8 tahun 2015 di Kuala Lumpur difokuskan pada dua topik: (i) penguatan persatuan dan hubungan negara-negara ASEAN; dan (ii) kerjasama ASEAN dalam menangani tantangan keamanan non-tradisional. Para delegasi menekankan pentingnya kesatuan negara-negara kawasan ketika berhadapan dengan negara-negara besar. ASEAN harus terus memainkan peran proaktif sebagai kekuatan penggerak

utama dalam hubungan dengan mitra eksternal dan mempertahankan sentralitas dalam arsitektur regional.

Pada tahun 2016 yang merupakan pertemuan NADI ke-9 diadakan di Vientiane yang mana agenda difokuskan pada:

- i. politik dan keamanan regional sebagai *emerging trends* dan tantangan baru;
- ii. meningkatkan kerjasama pertahanan asean dalam penanganan ancaman non-tradisional dan tantangan untuk pembangunan masa depan komunitas ASEAN;
- iii. mempertahankan kerjasama keamanan-pertahanan asean untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Para delegasi secara luas sepakat bahwa masalah keamanan non-tradisional tetap yang paling mendesak, terutama mengenai perdagangan gelap senjata kecil dan senjata ringan, perdagangan narkoba dan kejahatan lintas negara lainnya. Mereka juga menyoroti pentingnya kerja sama antara militer, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta dalam menangani masalah ini. Dalam pertemuan ini disetujui rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan kerjasama dalam menangani masalah keamanan non-tradisional terhadap peningkatan

Komunitas ASEAN. Dalam tahun tersebut NADI mengadakan workshop mengenai “*Contribution of ACMM to Enhance Human Security*” dan “*Maritime Security*” di Bali. Para delegasi NADI memberikan presentasi tentang kebijakan nasional mereka dan perspektif tentang keamanan maritim di Asia Tenggara, menyoroti pentingnya wilayah ini dimana sekitar setengah dari perdagangan dan energi dunia lulus melalui jalur laut di wilayah ini. Mereka juga menyarankan cara-cara untuk bekerja sama dalam memerangi kejahatan lintas negara di kawasan untuk menjamin keamanan jalur laut dan pelabuhan. Selain itu juga menyarankan untuk mendirikan pusat respons nasional yang secara efektif dapat menangani kejahatan transnasional dalam domain maritim. Setiap pertemuan NADI dihadiri oleh Indonesia sebagai salah satu bentuk diplomasi pertahanan negara dalam menjaga integritas APSC. Karena pada dasarnya fungsi dari APSC di kawasan Asia Tenggara adalah untuk memberikan dorongan pada negara-negara anggota ASEAN agar dapat mengatur sistem anarki yang ada, tidak terpaku lagi pada *security dilemma* yang selama ini menjadi permasalahan utama di antara negara-negara anggota ASEAN, serta menekankan penyelesaian permasalahan

antarnegara di kawasan melalui cara damai sebagai salah satu upaya untuk mencapai stabilitas kawasan.

Peran NADI disini adalah sebagai wadah untuk membantu negara memecahkan tantangan-tantangan keamanan negara. Dalam hal ini, komunitas epistemik diharapkan dapat membantu mengendalikan *power* yang dimilikinya untuk mencapai sebuah kepentingan nasional negara agar dapat mengambil keputusan dengan baik. Karena keputusan tersebut tidak hanya mempengaruhi negara namun juga mempengaruhi negara lain serta kebijakan-kebijakan dalam membahas masalah keamanan kawasan. Kehadiran komunitas epistemik dalam konteks APSC menjadi sangat penting di tengah dinamika ekonomi dan politik di Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara penggagas APSC akan banyak memainkan peran dalam relasinya dengan negara-negara kawasan ASEAN. Relasi tersebut tentu diperhadapkan dengan adanya gejolak dan friksi dalam dinamika hubungan antar-negara. Oleh karena itu dalam hal ini, komunitas epistemik bisa menjadi salah satu media untuk menyelesaikan persoalan antarnegara ASEAN.

Komunitas epistemik yang ada dalam forum simposium dapat membantu pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan segala bentuk persoalan termasuk persoalan-persoalan keamanan negara dan kawasan regional serta dapat membantu mendobrak stabilitas keamanan. Hal ini karena komunitas epistemik akan bergerak menggunakan pendekatan-pendekatan argumentatif yang didasarkan atas kajian ilmiah setiap individu yang berada dalam komunitas tersebut. Sesuai dengan konsep diplomasi pertahanan itu sendiri, diplomasi pertahanan dilakukan pada masa damai menggunakan kekuatan bersenjata dan infrastruktur yang terkait sebagai alat kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri, dapat dikatakan bahwa konsep APSC dengan kerjasama-kerjasama yang dilakukan merupakan suatu upaya untuk mendapatkan CBM antar negara di ASEAN. Terbentuknya CBM itu kemudian diharapkan dapat mampu mencegah terjadinya konflik antar negara dan dengan berbagai perkembangan isu-isu keamanan non-tradisional dapat diminimalisir dengan adanya suatu organisasi internasional, yaitu APSC, yang beranggotakan negara-negara anggota ASEAN, sehingga tercipta suatu stabilitas kawasan yang baik dan

memberikan rasa damai dalam kelangsungan hubungan antar negara. Indonesia sebagai negara yang memiliki andil besar dari lahirnya APSC tersebut menjadikan kebijakan luar negerinya berfokus pada stabilitas keamanan di ASEAN. Melalui sumbangsih pemikiran para akademisi yang tergabung didalam komunitas epistemik kemudian diharapkan mampu memberikan ide-ide atau gagasan yang baik untuk berlangsungnya perdamaian di kawasan.

Kesimpulan dan Saran

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah terbesar di ASEAN saat ini menjadikan ASEAN sebagai fokus utama dalam kebijakan luar negerinya. Keamanan dan stabilitas ASEAN menjadi salah satu kebutuhan, karena dapat disimpulkan bahwa apapun yang terjadi di ASEAN, baik atau buruknya akan memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan dan stabilitas dalam negeri Indonesia itu sendiri. Gagasan yang diberikan komunitas epistemik untuk kemudian membentuk APSC didalam pilar Komunitas ASEAN, menurut pendapat penulis tidak terlepas dari kepentingan Indonesia untuk dapat menciptakan perdamaian di ASEAN agar tidak mengganggu stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Komunitas epistemik,

yang kemudian pemerintah juga memiliki kesamaan dalam pemikiran, jika suatu stabilitas kawasan tidak hanya didapat dari kesejahteraan ekonomi saja tanpa adanya dukungan dari keamanan di kawasan menjadi dasar dari terbentuknya APSC itu sendiri.

Indonesia juga merupakan negara yang mempercayai bahwa peningkatan hubungan melalui diplomasi, dengan cara yang sudah dilakukan ASEAN selama 50 tahun, yaitu melalui dialog, menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat intens melakukan hubungan kerjasama pertahanan dengan menggunakan instrument-instrumen yang dimiliki sebagai salah satu upaya melakukan diplomasi pertahanan. Kerjasama-kerjasama yang Indonesia lakukan bertujuan untuk dapat membangun *Confidence Building Measures* dengan negara-negara anggota ASEAN yang lain, sehingga tercipta rasa saling percaya antar negara dan hal tersebut kemudian mampu menghasilkan stabilitas kawasan yang damai, aman, sejahtera. Keikutsertaan komunitas epistemik dalam APSC, mulai dari gagasan kerangka APSC, cetak biru APSC, dan juga keberlangsungan APSC dengan diadakannya organisasi non-pemerintah, yaitu *think tank* yang menjadi *Track II* tiap-

tiap anggota ASEAN melalui NADI, menjadi suatu bukti nyata bahwa negara mengakui peran dari komunitas epistemik itu sendiri, dimana komunitas tersebut dapat menghasilkan gagasan-gagasan serta ide-ide dari hasil penelitian yang mereka lakukan yang pada akhirnya mampu memberikan masukan dan rekomendasi yang baik bagi para *stake holder* saat akan mengambil suatu keputusan. Keinginan Indonesia membawa norma demokrasi kedalam ASEAN menjadi salah satu kepentingan Indonesia yang berhasil diwujudkan dalam APSC sebagai salah satu pilar didalam Komunitas ASEAN.

APSC merupakan bentuk cita-cita kestabilan politik dan keamanan yang diharapkan dapat tercapai di ASEAN. Penulis melihat, globalisasi dan dunia yang semakin terintegrasi dari berbagai aspek menjadi alasan mengapa pembentukan APSC ini sebagai satu hal yang penting untuk dilaksanakan. Isu *transnational crime* seperti terorisme, perdagangan manusia, isu maritim, dan perdagangan obat-obatan terlarang menjadi beberapa permasalahan yang sering dibahas dan ditangani oleh APSC saat ini. Telah terdapat berbagai capaian yang diraih melalui kerjasama antara negara-negara anggota APSC ini, namun

prinsip non-intervensi bagi penulis sendiri memang terlihat menghambat penyelesaian masalah di tingkat nasional. Hal ini dikarenakan perbedaan kapabilitas tiap negara yang berbeda dalam penanganan isu nasional seringkali dihambat oleh ego identitas ASEAN yang melihat non-intervensi sebagai satu hal yang absolut. Kemudian keikutsertaan komunitas epistemik menjadi hal yang membantu upaya integrasi ASEAN dan hal tersebut membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam membentuk ASEAN menjadi lebih baik lagi kedepan, telah terlaksana melalui *think tank* yang dimiliki oleh setiap negara-negara anggota di ASEAN. Saran penelitian ini terdiri dari saran penelitian teoretis dan saran penelitian praktis. Saran teoritis akan ditujukan kepada komunitas epistemik untuk keberlangsungan peran yang dilakukan di masa yang akan datang dan saran praktis untuk setiap pihak yang terlibat untuk mewujudkan diplomasi pertahanan Indonesia yang baik yaitu kementerian-kementerian yang terkait dalam pengambilan kebijakan di Indonesia.

Peran yang dilakukan komunitas epistemik memiliki pengaruh yang besar untuk pemerintah di Indonesia. Hal-hal yang peneliti rasa perlu dilakukan oleh

komunitas epistemik adalah untuk melakukan *executive summary* yang baik dan memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk membaca masukan, ide, dan rekomendasi untuk pemerintah. Banyaknya kumpulan-kumpulan *think-tank* di Indonesia menjadi suatu hal yang baik dikarenakan hal tersebut menandakan antusiasme yang tinggi dari masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, menurut peneliti akan sangat baik jika masyarakat yang terlibat dalam komunitas epistemik-komunitas epistemik yang ada dapat melakukan pertemuan dengan tujuan menyatukan kebersamaan demi Indonesia yang lebih baik.

Keberadaan komunitas epistemik memberikan dampak yang baik dalam contoh kasus kerangka APSC yang telah dilakukan penelitian oleh peneliti. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berjalan dengan baik berdasarkan keikutsertaan kedua belah pihak dalam membahas suatu permasalahan atau untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan diadakannya seminar, *forum group discussion*, atau dengan dihasilkannya *policy brief* yang

merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh komunitas epistemik. Hal-hal tersebut menumbuhkan suatu rangkaian kuat untuk dapat menjadikan kebijakan Indonesia menjadi lebih tepat dan menguntungkan demi kesejahteraan, perdamaian, ataupun stabilitas di dalam dan di luar negeri Indonesia. Peneliti kemudian menyarankan untuk lebih ditingkatkan lagi hubungan yang dimiliki oleh pemerintah dengan komunitas epistemik dan mendorong komunitas epistemik untuk dapat menghasilkan suatu saran atau rekomendasi bagi pemerintahan melalui draft *policy brief* yang lebih baik lagi dan isinya tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Arif, M. (2015). Peran Komunitas Epistemik dalam Pengembangan HI di Indonesia. *Academia*.
- ASEAN. (2010). *ASEAN Selayang Pandang*. DKI Jakarta: Sekretariat ASEAN.
- ASEAN. (2010). *Piagam ASEAN*. Jakarta: asean.org.
- ASEAN. (2012). *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Sekretariat ASEAN.
- ASEAN Secretariat. (2009). *ASEAN Political-Security Community Blueprint*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Buzan, B. (1991). *People, State and Fear*. London: Harvester.
- Chandra, A. C. (2009). *The Role of Non-State Actors in ASEAN*. Retrieved from Revisiting Southeast Asian Regionalism: www.alternative.regionalisms.org
- Fauzi, N. A. (2008). *Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap ASEAN: Studi Kasus Proses Pembentukan ASEAN Community*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Gindarsah, I. (2015). "Indonesia's Defence Diplomacy; Harnessing The Hedging Strategy Againsts Regional Uncertainties. *RSIS Monograph No.21*.
- Haas, P. M. (1989). *Do Regimes Matter? Epistemic Communities and Mediterranean Pollution Control*. Summer 1989.
- Haas, P. M. (1992). *Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination. International Organization Vol. 46*.
- Haqqi, H. (2016). *Peluang dan Tantangan Pengembangan Potensi Daerah Melalui Komunitas ASEAN 2015*. Retrieved from Portal Garuda: download.portalgaruda.com
- Kementerian Luar Negeri RI. (2013). *Cetak Biru Komunitas Keamanan ASEAN 2015*. Retrieved from Komunitas ASEAN: <http://www.kemlu.go.id/>
- Luhulima, C. P. (2010). *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan P2P LIPI.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pedrasan, R. (2015). *ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community?* Heidelberg: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Institut für Politische Wissenschaft.
- Pedrasan, R. (2015). *Dua Sisi Koin Diplomasi Pertahanan*. Retrieved

- from Sindo News:
nasional.sindonews.com
- Pratama, Y. W. (2014). Tantangan dan Peluang Indonesia dalam Pembentukan ASEAN Community 2015 di Bidang Keamanan. *Jurnal Skripsi*.
- Simatupang, G. E. (2013). *Forum Kajian Pertahanan dan Maritim*. Retrieved from FKP Maritim: www.fkpmaritim.org
- Sinaga, O. (2013). Epistemic Community and The Role of Second Track Diplomacy in East Asia Economic Cooperation. *World Applied Sciences Journal*.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tan, B. S. (2011). From 'Boots' to 'Brogues': The Rise of Defence Diplomacy in South East Asia. *RSIS Monograph No.21*.